



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.409207/2020



DS:1637-7590-3006-4627

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
 4. Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
- Sebesar Rp. 1.723.869.000 (SATU MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional
013.10.12.5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.723.869.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBPP PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN KENDARI	(060) Rp.	1.723.869.000			

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.



Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2020
I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
 Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Kuasa Pengguna Anggaran : S O F Y A N
 Bendahara Pengeluaran : RINARTY NURWALYAH
 Pejabat Penanda Tangan SPM : IR. ABD. RAHMAN L, M.H.

1	Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.723.869.000
	Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM	1.723.869.000
2	Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	1.723.869.000
	Hasil (Outcome)	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum	
	IKU Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	
		02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	
		03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	
		04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	
		05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	
	Kegiatan	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	1.723.869.000
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	
		02	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi	
		03	Jumlah pemberian, dan penyaluran dana bantuan hukum di wilayah serta verifikasi dan akreditasi OBH	
		04	Jumlah kegiatan penyuluhan hukum di daerah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	
		05	terselenggaranya kegiatan fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah	
		06	terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIH	
		07	terselenggaranya identifikasi dan penjiangan OBH sebagai dasar pelaksanaan verifikasi dan akreditasi OBH	
	Keluaran (Output)	5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.104.000.000
		5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	181.390.000
		5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	81.817.000
		5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	164.748.000
		5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	95.911.000
		5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIH	96.003.000

Jakarta, 12 November 2019
 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
 Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
 NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
 Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA								LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
409207	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	-	1.704.119	19.750	-	-	-	-	1.723.869		
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	-	1.704.119	19.750	-	-	-	-	1.723.869		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	1.704.119	19.750	-	-	-	-	1.723.869		
5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	-	1.104.000	-	-	-	-	-	1.104.000	20.51	
01	RM	-	1.104.000	-	-	-	-	-	1.104.000	060	
5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	-	181.390	-	-	-	-	-	181.390	20.51	
01	RM	-	181.390	-	-	-	-	-	181.390	060	
5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	81.817	-	-	-	-	-	81.817	20.51	
01	RM	-	81.817	-	-	-	-	-	81.817	060	
5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	-	164.748	-	-	-	-	-	164.748	20.51	
01	RM	-	164.748	-	-	-	-	-	164.748	060	
5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	-	95.911	-	-	-	-	-	95.911	20.51	
01	RM	-	95.911	-	-	-	-	-	95.911	060	
5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDJHN	-	76.253	19.750	-	-	-	-	96.003	20.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1637-7590-3006-4627

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
 Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	76.253	19.750	-	-	96.003	060	
	JUMLAH	-	1.704.119	19.750	-	-	1.723.869		

Jakarta, 12 November 2019
 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
 Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
 NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
 Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : III. 1
 (dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	409207	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	86.193	172.387	172.387	172.387	172.387	86.193	86.194	172.387	172.387	172.387	172.387	86.193	1.723.869
		RENCANA PENARIKAN DANA	86.193	172.387	172.387	172.387	172.387	86.193	86.194	172.387	172.387	172.387	172.387	86.193	1.723.869
		52 BELANJA BARANG	86.193	172.387	172.387	172.387	172.387	86.193	86.194	172.387	172.387	172.387	172.387	86.193	1.723.869
		013.10.12.5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	86.193	172.387	172.387	172.387	172.387	86.193	86.194	172.387	172.387	172.387	172.387	86.193	1.723.869
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	86.193	172.387	172.387	172.387	172.387	86.193	86.194	172.387	172.387	172.387	172.387	86.193	1.723.869

Jakarta, 12 November 2019
 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
 Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
 NIP. 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409207/2020
IV. C A T A T A N**



DS:1637-7590-3008-4627

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [409207] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003